

## **ANALISIS KEBIJAKAN LAHAN DAN KETAHANAN PANGAN TERHADAP PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERIURBAN KABUPATEN BANTUL**

Oleh :  
Pulung Haryadi<sup>1)</sup>

***This study was conducted in suburban area of Bantul regency covering the districts having direct border to Yogyakarta City, i.e. Banguntapan, Sewon, and Kasihan (16 villages). Land limitation caused competition of land usages based on different interests. Suburban is one of area that have to face these interest conflicts due to settlement spreading in Yogyakarta City because of land limitedness for new area of settlement or service and merchandising. Land usage shifting occurred in suburban area will disturb food tenacity in Bantul Regency because the area of wet rice field in this regency is vast enough covering more than 4,000 hectares.***

***This study is aimed to know the condition of land usage shifting from agriculture to non-agriculture and to know the condition of food tenacity in suburban area, so that there is reason to set area development priority, which is useful for setting development policy in suburban area of Bantul Regency.***

***This study is using secondary data consisted of time series data for the periode of seven years (2000-2006). This data was collected from several institutions such as BPN, Bappeda, Statistic Office, Agriculture Department of Bantul, and district offices. In addition, the study is also using primary data collected by means of interview with those officers having direct interest to this study such as agriculture officials and several groups of people to gather their perceptions about this study. Data analysis is using qualitative methods descriptively and equipped with SWOT analysis.***

***The results of this study are (1) in suburban area, there are inclination of land decreasing because of land usage shifting about 0.5% annually; (2) factors influencing land usage shifting are increasing of area accessibilities, population growth, and increasing of infrastructures; (3) until 2007 there are 4 villages that were unable to meet the food requirement of their population from their own area and 12 villages were able to meet the food requirement of their population; and (4) for combination of two indicators, i.e. land productivity and the growth of land usage shifting, there are 4 development priority area that having suitable allotment, i.e. agricultural area, small-middle industrial area, agrobusiness and agroindustrial area, and service and commercial area.***

1. Ir. Pulung Haryadi, M.Sc. adalah Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kab. Bantul, Alumni Program Studi Magister Studi Kebijakan UGM.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peningkatan permintaan lahan menyebabkan persaingan penggunaan lahan antara sektor pertanian dan sektor non pertanian, akibatnya terjadi alih fungsi lahan. Problematika tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Penentuan kebijakan lahan tidak lepas dari proses perumusan kebijakan publik yang memerlukan analisis agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Dewasa ini eksistensi sistem pertanian menghadapi berbagai dilema sejalan dengan makin rusaknya sumber daya alam akibat sistem pembangunan yang eksploitatif dengan mengandalkan pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan yang memacu peningkatan industrialisasi dengan mengesampingkan sektor pertanian.

Pengurangan lahan pertanian di Indonesia dari tahun ke tahun terus berlangsung. Tercatat pada kurun waktu 1988-1993 alih fungsi penggunaan tanah sawah untuk keperluan non pertanian mencapai 8.255 hektar. Penyempitan lahan pertanian secara langsung meningkatkan jumlah petani gurem dengan luas lahan pertanian sama atau lebih kecil dari 0,25 Ha.

Kondisi lahan sawah pada tahun 2002 di Propinsi DIY mengalami penurunan cukup signifikan yaitu pada tahun 1983 seluas 63.263 hektar menjadi 58.367 hektar (turun 4.896 ha).

Dengan melihat data tersebut maka proses terjadinya alih fungsi lahan

pasti selalu terjadi khususnya di kawasan periurban. Hal ini disebabkan kawasan periurban Kabupaten Bantul merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan proses pembangunan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pembangunan Kota Yogyakarta dan penambahan penduduk yang terjadi di Kabupaten Bantul itu sendiri.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian telah dilakukan oleh pemerintah lewat berbagai peraturan daerah dan surat keputusan Bupati yaitu melalui Peraturan Daerah No. 23 tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Lahan dan peraturan daerah yang mengatur tata ruang daerah No.4 tahun 2002. Pada peraturan daerah tersebut telah diatur fungsi-fungsi lahan berdasarkan satuan wilayah pengembangan yang terbagi menjadi enam wilayah pengembangan, yakni kawasan budidaya pertanian lahan basah, kawasan aglomerasi perkotaan, kawasan tumbuh cepat, kawasan pusat pemerintahan, kawasan perbukitan, dan kawasan pantai.

Kenyataannya alih fungsi lahan selalu terjadi di kawasan periurban yang berdasarkan kebijakan digunakan untuk pengembangan penyangga kota dan pertanian. Pada sisi lain produktifitas lahan tidak mampu lagi mengejar besarnya alih fungsi lahan. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan dua kebijakan pangan yaitu (1) tetap mengandalkan luas lahan pertanian yang ada di periurban guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dan (2) target produktifitas rata-rata adalah 7,5 ton/ha gabah kering pungut

agar tercapai swasembada pangan. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi saat ini yang menunjukkan bahwa dari total lahan pertanian seluas 116.316 hektar sebanyak kurang lebih 4.000 hektar (30%) berada di daerah periurban.

Terdapat pandangan yang berbeda menanggapi fenomena besarnya perubahan fungsi lahan yang dipandang sebagai sesuatu yang menguntungkan. Hal ini terjadi khususnya perubahan lahan untuk Industri karena perubahan tersebut mampu menyerap tenaga kerja dan pengangguran dalam jumlah yang besar. Terjadinya perbedaan kepentingan tersebut harus diselaraskan melalui upaya-upaya pengkajian. Hal ini disebabkan kedua kebijakan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan kawasan periurban.

Pengkajian tentang analisis kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan kebijakan ketersediaan pangan diharapkan dapat digunakan untuk menentukan prioritas pengembangan kawasan periurban, sehingga pembangunan yang dilakukan mempunyai arah yang jelas dan berkeadilan.

Bila dilihat penataan kawasan secara lebih luas terdapat kebijakan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadikan kawasan *ring road* selatan sebagai kawasan perkembangan kota menuju sektor perdagangan dan jasa. Kondisi saat ini kawasan periurban di Kabupaten Bantul seluruhnya dilewati oleh jalur *ring road* selatan. sehingga kebijakan tersebut membawa dampak pada kebijakan yang harus ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Berdasarkan hal tersebut maka muncul pertanyaan:

“Bagaimanakah arah prioritas pengembangan kawasan periurban sehubungan dengan tingginya alih fungsi lahan dan kebijakan untuk tetap menyediakan pangan di periurban?”

## B. Perumusan Masalah.

Pertambahan penduduk yang terjadi akibat pembangunan yang pesat di Kota Yogyakarta, dan sekitarnya menyebabkan perbedaan kepentingan terhadap lahan terutama kepentingan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan kepentingan non pertanian. Disamping itu adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadikan kawasan *ring road* selatan sebagai kawasan perkembangan kota menuju sektor perdagangan dan jasa, berpengaruh terhadap kawasan periurban Kabupaten Bantul.

Peraturan daerah tentang alih fungsi lahan dan peraturan daerah tentang penataan lahan belum mampu mengatasi lajunya alih fungsi lahan yang terus dan pasti terjadi terutama di daerah periurban. Pada sisi lain terdapat kebijakan di bidang pertanian yang mengharuskan adanya kelestarian swasembada pangan. Situasi dan kondisi ini selalu berbenturan di daerah periurban karena banyaknya kepentingan dan kebutuhan untuk menguasai kepemilikan lahan karena berkaitan dengan nilai-nilai ekonomi dan sosial yang strategis di daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan :

“Bagaimanakah arah prioritas pengembangan kawasan periurban sehubungan dengan tingginya alih fungsi lahan dan kebijakan untuk tetap menyediakan pangan di periurban?”

### C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Mengetahui alih fungsi lahan di kawasan periurban.
- 2) Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan.
- 3) Mengetahui tingkat ketersediaan beras di periurban.
- 4) Mengetahui arah prioritas pengembangan kawasan periurban.

## II. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada kawasan periurban di Kabupaten Bantul yang meliputi kecamatan Sewon, Banguntapan, dan Kasihan yang merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Kawasan ini mengalami alih fungsi lahan yang cukup tinggi dan angka produktifitas padi cukup tinggi pula. Selanjutnya ketiga kecamatan tersebut telah ditetapkan dalam kebijakan daerah melalui peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai kawasan aglomerasi perkotaan dan kawasan pertanian.

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif adalah suatu metode penelitian untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan hipotesa. Penelitian ini mendasarkan pada pemecahan masalah yang aktual yang ada pada saat ini. Data yang dikumpulkan kemudian disusun, dijelas-

kan kemudian dianalisis sehingga memberi gambaran mengenai fenomena-fenomena yang terjadi, menerangkan hubungan serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang dipecahkan. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui prioritas pengembangan kawasan periurban berdasarkan dua kebijakan lahan yaitu alih fungsi lahan dan ketahanan pangan dengan lima indikator utama besarnya alih fungsi lahan, produktifitas padi, ketersediaan pangan, nilai jual lahan, dan pertambahan penduduk. Selain deskriptif juga dilakukan penajaman dengan menggunakan analisis SWOT untuk mengetahui strategi alternatif pengembangan kawasan.

## III. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Lahan

Kebijakan lahan pada penelitian ini berbicara mengenai alih fungsi lahan yang terjadi di periurban. Adapun implementasi saat ini masih mengacu pada peraturan daerah yang meliputi:

- 1) Peraturan Daerah tentang retribusi alih fungsi lahan pada tahun 1993.
- 2) Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- 3) Perda No. 4 pada tahun 2002 tentang penataan ruang.
- 4) Kebijakan yang bersifat sektoral.

Peraturan-peraturan tersebut yang diharapkan berfungsi untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke

non pertanian. Adapun dari keempat peraturan tersebut yang berkaitan dengan kebijakan lahan yang paling berhubungan adalah Perda No.4 tahun 2002, yang membagi wilayah Kabupaten Bantul ke dalam 6 satuan wilayah dan pada RPJMD dibagi ke dalam 6 wilayah pengembangan yaitu kawasan budidaya pertanian lahan basah, kawasan aglomerasi perkotaan, kawasan tumbuh cepat, kawasan pusat pemerintahan, kawasan perbukitan, dan kawasan pantai.

Berdasarkan peraturan tersebut maka wilayah yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam wilayah aglomerasi perkotaan, sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2002 maka Kecamatan Sewon, Banguntapan, dan Kasihan termasuk satuan wilayah III yang dikenal sebagai daerah penyangga Kota Yogyakarta dan pertanian lahan basah.

Analisis tentang kebijakan lahan dapat dijabarkan melalui tiga aspek mendasar yaitu berkaitan dengan (1) besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhi, (2) pengelolaan lahan, dan (3) nilai jual lahan. Adapun pendekatan untuk menggambarkan kondisi alih fungsi lahan dapat dilakukan melalui tinjauan secara ekonomis, aksesibilitas lokasi dan kondisi fisik, serta kondisi demografi.

Analisis tentang alih fungsi lahan dapat dilihat dari besarnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kawasan periurban Kabupaten Bantul dapat terbagi dalam 3 kawasan berdasarkan administratif yaitu :

1) Kawasan Banguntapan, pada kawasan ini dapat dijabarkan bahwa kondisi alih fungsi lahan yang terjadi di Kawasa Banguntapan banyak terjadi karena adanya proses ekonomi dengan maraknya perdagangan sektor formal dan informal di kawasan tersebut dan aksesibilitas transportasi yang meningkat dengan signifikan serta penambahan penduduk yang cukup tinggi. Pengamatan di lapangan menunjukkan adanya blok-blok pusat perdagangan dengan jumlah rumah yang terbangun semakin padat, pada umumnya dipergunakan untuk permukiman, perdagangan, toko-toko, lembaga pendidikan, dan lain-lain.

Bila dianalisis secara fisik maka kawasan Banguntapan saat ini menghadapi permasalahan yang cukup rumit berkaitan dengan perubahan perkembangan yang nampak tidak terkendali pada semua aspek pembangunan khususnya bangunan di sepanjang jalan yang strategis secara ekonomi. Kondisi ini terletak di jalan Yogyakarta-Piyungan sampai batas Desa Potorono paling timur, jalan Janti bagian utara desa Banguntapan, jalan Imogiri timur sampai sekitar perempatan terminal Giwangan. Pada lokasi sekitar JEC dan pusat kota Banguntapan relatif terkendali. Permasalahan lain daerah sawah yang menjadi perumahan seperti di Wirokerten, sedangkan desa Potorono dan Jambidan alih fungsi lahannya menjadi industri batubata.

Berdasarkan analisis potensi maka Kecamatan Banguntapan dapat dinyatakan bahwa akses yang ada cukup terbuka yang dihubungkan atau dekat jalan arteri, jalan kolektor maupun jalan lingkungan yang kondisinya beraspal.

Pendukung yang lain adalah transportasi umum jarak jauh (antar propinsi) selama 24 jam. Kedekatan dengan kota Yogyakarta menguntungkan secara ekonomi tapi merugikan pada aspek sampah, air bersih luapan drainase, dan lain-lain.

Pada tata bangunan terutama berupa pemukiman, pemukiman dengan campuran usaha perdagangan/per tokoan (fungsi komersial) yang terdapat pada lokasi strategis yang meliputi perempatan Ketandan (jalan arteri) ke timur ke arah Piyungan sampai batas timur Desa Potorono, sepanjang jalan Gedongkuning Desa Banguntapan, jalan Modorakan di Desa Jagalan, Jalan arteri Janti, pusat kota Kecamatan Banguntapan serta jalan Imogiri atau seputar perempatan terminal baru Giwangan. Lokasi-lokasi tersebut merupakan lokasi dengan kepadatan bangunan tertinggi dibandingkan dengan lokasi yang lain. Khusus untuk Desa Jagalan seluruh area telah dipenuhi dengan bangunan perumahan.

Analisis secara ekonomi dapat diketahui melalui dominasi mata pencaharian pada susunan PDRB di Kecamatan Banguntapan. Mata pencaharian penduduk di kawasan Banguntapan mempunyai banyak variasi akan tetapi bila diambil tiga besar prioritas mata pencaharian untuk masing-masing desa maka dapat disajikan sebagai berikut: di desa Banguntapan maka struktur terbesar ada pada sektor perdagangan sebesar 40,47%, selanjutnya sektor bangunan sebesar 22% dan sektor pertanian relatif kecil sebesar 16,46%.

2) Kawasan Sewon, pada Kawasan Sewon ini tanah pertaniannya relatif

subur dengan pengairan cukup baik, akan tetapi karena desakan pembangunan kota Yogyakarta justru tepat mengarah ke kawasan ini. Banyaknya minat masyarakat kota Yogyakarta dan sekitarnya untuk menetap di kawasan ini banyak disebabkan letaknya yang cukup dekat dengan pusat keramaian, dan kondisi air minum cukup baik dan terjangkau jaringan PDAM.

Akses lain yang cukup baik di kawasan ini adalah adanya pengolahan air limbah rumah tangga, jaringan listrik dan telekomunikasi cukup memadai, sehingga sangat menarik untuk investai dan pemukiman.

Secara fisik dan aksesibilitas dapat dilihat bahwa Penggunaan lahan di kawasan Sewon masih didominasi oleh tanah sawah pada tahun 2005 seluas 1305 ha, diikuti perumahan dan pekarangan seluas 1.247 ha. Penggunaan air irigasi menggunakan aliran air dari sungai Winongo dan Code. Adapun akses jalan dapat dirinci dalam lima kelas jalan yang ada yaitu jalan desa sepanjang 57,4 km, jalan lingkungan sepanjang 22,46 km, jalan protokol sepanjang 2,46 km, jalan kabupaten sepanjang 15,4 km, dan jalan propinsi sepanjang 8,07 km. Bila melihat data tahun 2006 walaupun sawahnya masih cukup luas akan tetapi jika dilihat jumlah rumah permanen dan semi permanen cukup tinggi di kecamatan Sewon sebanyak 17.012 rumah, adapun desa terbanyak rumahnya adalah Pangunharjo sebanyak 6.645 rumah, selanjutnya desa Bangunharjo sebanyak 4.015 rumah. Analisis kondisi rumah non permanen justru terbanyak di Desa Bangunharjo sebanyak 1.380 rumah



dibandingkan dengan Panggungharjo hanya sebanyak 411 rumah. Hal ini banyak terkait dengan kondisi jalan arteri atau *ringroad* selatan serta jalur menuju obyek wisata religius Imogiri yang langsung melewati Bangunharjo sehingga banyak menarik orang untuk melakukan proses perdagangan di pinggir jalan yang banyak menumbuhkan sektor informal di wilayah itu.

Secara ekonomis dominasi pemenuhan kebutuhan masyarakat di kawasan Sewon masih didominasi oleh sektor pertanian terutama untuk tanaman pangan, dengan komoditas utama padi sawah rata-rata seluas 2.730 ha per tahun, kacang tanah seluas 319 ha, dan jagung seluas 266 ha, serta kedelai seluas 187 ha maka oleh pemerintah daerah kawasan ini masih sangat diharapkan menjadi lumbung pangan untuk Kabupaten Bantul.

Penggerak ekonomi yang lain adalah sektor peternakan dengan didominasi oleh ternak unggas ras dengan populasi sebanyak 106.219 ekor dan bukan ras sebanyak 28.611 ekor. Adapun untuk ternak yang lain adalah sapi potong sebanyak 2.337 ekor dan kambing sebanyak 2.566 ekor. Kebutuhan masyarakat di kawasan ini juga dipenuhi lewat kegiatan ekonomi di sektor industri dengan dominasi di industri kecil sebanyak 1634 unit, industri sedang sebanyak 38 unit, dan industri besar sebanyak 9 unit yang terpusat di Panggungharjo sebanyak 4 unit.

Pada sektor industri kecil relatif kecil pengaruhnya terhadap alih fungsi lahan karena pada umumnya berada di tingkat rumah tangga dengan jumlah

tenaga kerja berkisar kurang lebih lima orang, akan tetapi untuk industri menengah dan besar sangat mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Walaupun secara ekonomis dan politis kegiatan industri menengah dan besar ini sangat menguntungkan karena mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar bahkan rata-rata 3.000 orang per pabrik bisa dicapai, disisi yang lain usaha pertanian hasilnya belum dapat menjanjikan atau mengatasi pengangguran yang ada.

Sektor jasa dapat dilihat untuk mengetahui gaya hidup masyarakat di kawasan Sewon yang ternyata didominasi oleh bengkel mobil/motor sebanyak 129 buah, salon kecantikan sebanyak 55 buah dan jasa alat pesta sebanyak 28 buah. Hal ini menandakan adanya pergeseran nilai tradisional ke arah modernisasi gaya hidup, dan ini terus akan berkembang dengan semakin tingginya pendapatan masyarakat akibat munculnya peningkatan sektor industri dan perdagangan.

Analisis semografi dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk rata-rata terbesar ada di Panggungharjo sebesar 1,73% per tahun. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini terjadi karena migrasi maupun pertumbuhan akibat kelahiran. Kondisi ini akan sangat berpengaruh pada tata ruang karena dengan pertumbuhan penduduk tersebut akan menambah penggunaan lahan untuk hunian tempat tinggal. Desa Panggungharjo mempunyai jumlah prosentase penambahan tinggi karena pada desa tersebut terdapat 4 industri besar dan beberapa industri sedang seperti

pemecah plastik, dan lain-lain serta akses transportasi maupun informasi sangat baik sehingga secara alamiah kecenderungan manusia akan mencari pusat-pusat ekonomi sebagai jaminan kehidupannya.

Rata-rata pertumbuhan penduduk di desa Timbulharjo sebesar 0,14% dan Pendowoharjo sebesar 0,9% termasuk rendah karena dominasi kegiatan masih tradisional dan sektor pertanian masih menjadi andalan mata pencaharian di kawasan tersebut.

Desa Bangunharjo ternyata pertumbuhan penduduknya rendah sebesar 0,75%, walaupun daerah ini sudah berkembang ke arah non pertanian akan tetapi masih terkonsentrasi di sekitar terminal Giwangan dan beberapa lokasi menuju stadion Pacar di Jetis, sehingga migrasi yang terjadi masih bersifat ulang-alik.

Pertambahan jumlah rumah tangga yang tertinggi ada di Panggunharjo lebih besar dari 1000 rumah tangga. Hal ini menjadi bukti bahwa alih fungsi lahan di desa ini memberikan angka yang tinggi pula, karena pertumbuhan jumlah rumah tangga akan menambah kebutuhan lahan untuk hunian.

3) Kawasan Kasihan, pada kawasan ini terdapat desa yang menonjol perkembangan ke arah kota yaitu Desa Ngestiharjo, karena letaknya yang cukup strategis berada di jalur Yogya-Wates dan berbatasan langsung dengan pusat perdagangan yang ada di Kota Yogyakarta. Bila dianalisis faktor fisik maka

Kawasan Kasihan terletak pada jalur strategis karena dilalui oleh jalur ring road selatan pada tiga desa yaitu Tirtonirmolo, Tamantirto, dan Ngesti-

harjo dan dilalui pula oleh jalur Yogyakarta ke Bantul yang merupakan jalur perdagangan yang cukup padat.

Kondisi sangat terasa pada Desa Ngestiharjo yang mengalami alih fungsi lahan tertinggi lebih dari 2 ha per tahun atau 2,19%. Hal ini dapat dipahami karena desa Ngestiharjo terletak atau berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta dan sebagian berbatasan dengan Kabupaten Sleman.

Jalur jalan dari Yogyakarta menuju ke arah barat Kulon Progo juga sangat berpengaruh pada mobilitas penduduk dan aktifitas perdagangan di Desa Ngestiharjo ini. Aktivitas pada Desa Ngestiharjo cenderung berkembang menjadi bagian dari kawasan urban Yogyakarta dengan aktifitas fisik meliputi kawasan pemukiman, kawasan pendidikan, kawasan perdagangan dan jasa. Kawasan pemukiman berkembang memadati hampir sepanjang jalan Yogyakarta menuju Kulon Progo, demikian pula kawasan perdagangan dan jasa ada pada jalur ini

Analisis ekonomi dapat dilihat berdasarkan angka PDRB kabupaten Bantul masih didominasi oleh sektor pertanian dan industri kerajinan dan olahan. Demikian pula kawasan Kasihan ini memiliki kontribusi yang besar di sektor industri menengah seperti keberadaan pabrik gula PT. Madubaru yang mempunyai pangsa pasar domestik maupun internasional. Demikian pula dengan industri gerabah Kasongan yang sudah terkenal sampai ke luar negeri dengan jumlah nilai ekspor yang cukup tinggi.

Perkembangan kawasan Kasongan sangat dirasakan dampaknya terhadap



alih fungsi lahan karena terletak pada daerah yang beririgasi teknis terutama digunakan sebagai show room keramik. Berdasarkan pengamatan pasca gempa kegiatan perekonomian sempat terhenti dalam beberapa bulan akan tetapi saat ini telah pulih dan justru bertambah pengusuhnya. Kondisi di lapangan menunjukkan terjadinya migrasi dari luar masuk ke wilayah tersebut. Ini ditunjukkan dengan banyaknya bangunan baru di sepanjang jalur Kasongan-Bangunjiwo.

Kawasan pemukiman banyak terdapat di Ngestiharjo dengan tingkat kepadatan tinggi dan desa Bangunjiwo dengan tingkat kepadatan relatif rendah. Adapun kawasan perdagangan banyak terdapat di jalan Yogya-Wates dan Yogya-Godean di sekitar Balai Desa Ngestiharjo, dan berkembang sampai Sonopokis dengan banyaknya jasa hotel dan restoran.

Industri kerajinan yang berkembang lainnya adalah industri kerajinan kayu yang sudah cukup terkenal di luar negeri yaitu industri kerajinan kayu Kreet. Akan tetapi bila ditinjau dari alih fungsi lahan tidak terlalu berpengaruh karena berada di Desa Bangunjiwo yang memiliki lahan cukup luas tapi kurang produktif serta merupakan kegiatan rumah tangga sehingga rekrutmen karyawan hanya berasal dari wilayah sekitarnya.

Kawasan pendidikan juga mempengaruhi alih fungsi lahan terutama dengan berdirinya kampus baru dan rumah-rumah untuk tempat kos. Dalam hal ini perkembangan ada di kawasan Sonopakis, Sonosewu, dan Ngebel, yang menyebabkan daerah-daerah tersebut

menjadi lokasi pertumbuhan ekonomi baru dengan pertumbuhan warung makan, kos-kosan, wartel, dan lain-lain, yang mengakibatkan perputaran uang di daerah-daerah tersebut menjadi relatif tinggi.

Pertumbuhan penduduk akan selalu terjadi di kawasan Kasihan seiring dengan perkembangan kota Yogyakarta maupun besarnya angka kelahiran, dengan melihat data penduduk yang ada di Kawasan Kasihan. Laju pertumbuhan penduduk di masing-masing desa berturut turut dapat dijabarkan sebagai berikut: pertumbuhan penduduk Desa Bangunjiwo sebesar 1,24%, Tirtonirmolo sebesar 0,84%, Tamantirto sebesar 0,97%, dan Ngesiharjo sebesar 1,18%. Adapun rata-rata laju pertumbuhan penduduk adalah 1.03%. Bila dilihat dari rata-rata jumlah penduduk maka desa Ngestiharjo memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu 25.106 orang. Hal ini sangat wajar karena daerah ini memiliki letak yang sangat strategis untuk usaha perdagangan yang memperoleh dampak dari kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

Data-data tentang alih fungsi lahan dapat diambil rata-rata per tahun dengan mengambil data selama 7 tahun yang dapat tersaji pada tabel.

Dengan menggunakan angka prosentase rata-rata penyusutan lahan per tahun di propinsi DIY sebesar 0,52% per tahun dapat dibuat klasifikasi lahan. Berdasarkan angka tersebut maka desa yang mempunyai prosentase penyusutan lahan di atas 0,52% per tahun adalah desa yang termasuk dalam klasifikasi tinggi, sedangkan yang

Rata-rata alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di periurban

No	Desa	Alih fungsi lahan (2000 s/d 2006)	Rata-rata (M2 per tahun)	% penurunan per tahun
1	Banguntapan	175.346	24703,4	1,20
2	Tamanan	32.835	4642,1	0,19
3	Jagalan	0	0	0
4	Baturetno	116.412	15982,9	0,70
5	Potorono	16.154	2152,75	0,08
6	Wirokerten	35.805	4724	0,18
7	Singosaren	1.654	259,75	0,12
8	Jambidan	8.600	1183,1	0,05
9	Panggunharjo	90.973	10593,75	0,43.
10	Timbulharjo	34.537	3584,1	0,08
11	Pendowoharjo	40.091	4436,6	0,12
12	Bangunharjo.	143.944	19064,9	0,53
13	Ngestharjo	151.046	23528	2,19
14	Tamantirto	53.141	8842,9	0,40
15	Tirtonirmolo	44.036	7709,6	0,37
16	Bangunjiwo	6.647	852,9	0,04

Sumber: Bappeda (diolah).

berada di bawah 0,52% per tahun termasuk dalam klasifikasi rendah.

Adapun klasifikasi besarnya alih fungsi lahan dapat dilihat:

Berdasarkan data yang ada maka desa-desa yang mengalami alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian yang rata-rata tinggi adalah Banguntapan dan Baturetno untuk Kecamatan

No	Klasifikasi Alih fungsi	Nama Desa
1	Klasifikasi Tinggi (Penyusutan lahan di atas 0,52% per tahun)	Banguntapan, Ngestharjo, Bangunharjo, Baturetno
2	Klasifikasi rendah (Penyusutan lahan di bawah 0,52% per tahun)	Tamantirto, Tirtonirmolo, Wirokerten, Tamanan, Pendowoharjo, Timbulharjo, Potorono, Jambidan, Bangunjiwo, Singosaren, Jagalan, Panggunharjo

Sumber: Analisis data

Banguntapan, sedangkan Kecamatan Sewon yang tinggi alih fungsi lahannya adalah Bangunharjo dan Panggungharjo mendekati tinggi, serta desa Ngestiharjo untuk Kecamatan Kasihan.

Analisis alih fungsi dapat pula dilakukan melalui pendekatan nilai jual lahan. Guna mengetahui besarnya nilai lahan dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dilihat dari nilai jual obyek pajak pada lahan tersebut.

Nilai jual rata-rata di periurban adalah Rp 202.000/m<sup>2</sup>, sehingga dengan angka tersebut dapat diklasifikasikan nilai jual lahan. Pada lahan yang memiliki nilai jual di atas Rp 202.000/m<sup>2</sup> dinyatakan sebagai nilai jual lahan tinggi dan yang nilai jual lahan di bawah Rp202.000/m<sup>2</sup> masuk pada klasifikasi nilai jual rendah. Berdasarkan klasifikasi tinggi rendahnya nilai jual lahan maka kawasan periurban dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Klasifikasi nilai jual lahan ini dapat dipergunakan untuk mengetahui prediksi terhadap perkembangan suatu kawasan. Pada nilai jual lahan yang rendah biasanya kawasan tersebut masih beraktifitas di sektor pertanian, demikian sebaliknya pada nilai jual lahan tinggi pada umumnya perkembangan mengarah ke sektor non pertanian seperti industri maupun perumahan.

### **B. Kebijakan Ketahanan Pangan**

Pada kebijakan tentang ketahanan pangan pada penelitian ini menfokuskan pembahasan tentang kecukupan pangan khususnya beras, yang ditinjau dari sisi ketersediaannya dan kemampuan lahan untuk menghasilkan pangan. Produktifitas lahan pada suatu kurun waktu tertentu merupakan aspek penting dari ketahanan pangan karena melalui indikator ini dapat diketahui tentang ketersediaan pangan di wilayah tertentu.

Klasifikasi Nilai Jual Lahan

No	Klasifikasi Nilai jual lahan	Nama Desa
1	Klasifikasi tinggi (Nilai Jual diatas 202.000 rupiah/meter persegi)	Ngestiharjo, Banguntapan, Singosaren, Wirokerten, Bangunharjo, Panggungharjo, Jagalan, Baturetno
2	Klasifikasi rendah (nilai jual lahan di bawah 202.000,- rupiah per meter persegi)	Tamanan, Jambidan, Potorono, Pendowoharjo, Timbulharjo, Tirtionirmolo, Tamantirto, Bangunjiwo

Sumber: Analisis data

Aspek ketahanan pangan yang lain adalah pendistribusian pangan dan keterjangkauan pangan yang berkaitan erat dengan kemampuan daya beli masyarakat terhadap pangan.

Pada aspek ini kebijakan produktifitas telah ditetapkan melalui Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah sebesar 7,5 ton/ha gabah kering pungut. Target yang sama untuk setiap kawasan menunjukkan bahwa kebijakan yang digunakan adalah tidak spesifik lokasi. Seharusnya penetapan target mempertimbangkan faktor yang berpengaruh terhadap produktifitas seperti kesuburan tanah, kondisi jaringan irigasi, penggunaan benih dan kemampuan sumber daya manusia itu sendiri.

Hasil yang telah dicapai pada tahun 2007 menunjukkan angka rata-rata produktifitas padi di Kabupaten Bantul sebesar 7,2 ton/ha gabah kering pungut. Adapun sebaran produkstifitas tertinggi di Bantul bagian tengah seperti Kecamatan Sewon dan Bantul diatas 7 ton/ha gabah kering pungut dan terendah ada di Kecamatan Pajangan dan Dlingo di bawah 5 ton/ha gabah kering pungut. Angka rata-rata Kabupaten Bantul tersebut masih berada diatas rata-rata nasional sebesar 6,3 ton/ha gabah kering pungut. Peningkatan produktifitas lahan secara umum di Kabupaten Bantul lambat laun mengalami hambatan berkaitan dengan berlebihannya kandungan unsur phospat dalam tanah.

Angka produktifitas padi dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan beras sebagai cadangan makanan di suatu wilayah yang berkaitan dengan prediksi kemampuan suatu

lahan untuk menyediakan pangan dalam kerangka ketahanan pangan. Produktifitas tanaman pangan khususnya padi dihitung berdasarkan kemampuan lahan menghasilkan per satuan luas sehingga satuan untuk produktifitas adalah kuintal per hektar atau ton per hektar.

Data yang ada dapat menggambarkan bahwa tingkat produktifitas tertinggi di kawasan Banguntapan ada di Desa Jambidan dengan angka 73,95 ku/ha, sedangkan yang termasuk tinggi atau diatas 70 Ku/ha adalah hampir semua desa, sedangkan apabila dibandingkan dengan rata-rata Kabupaten Bantul sebesar 72 ku/ha maka dapat dinyatakan bahwa hanya desa Wirokerten dan Jambidan yang termasuk produktifitas tinggi sedangkan yang lain masih berada di bawahnya kecuali di Desa Jagalan yang tidak mempunyai sawah.

Semua desa di Kecamatan Sewon termasuk berproduktifitas tinggi karena berada diatas rata-rata kabupaten maupun nasional, sedangkan Kecamatan Kasihan berada di bawah rata-rata kabupaten di semua desa, atau produktifitasnya rendah, dengan kondisi terendah ada di Desa Bangunjiwo.

Guna membuat klasifikasi lahan yang berproduktifitas tinggi dan rendah sebaiknya digunakan angka produktifitas nasional sebagai standarnya. Hal ini disebabkan sampai saat ini angka tersebut yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ketahanan pangan pada aspek ketersediaan pangan. Angka produktifitas padi rata-rata secara nasional adalah 6,3 ton per ha gabah kering pungut. Dengan demikian standar yang digunakan untuk mengukur angka produktifitas adalah

lahan yang mempunyai produktifitas diatas 6,3 ton per ha gabah kering punggut dianggap sebagai lahan yang mempunyai produktifitas tinggi sedangkan lahan yang produktifitsanya berada di bawah 6,3 ton per ha dianggap sebagai lahan yang mempunyai produktifitas rendah.

Berdasarkan klasifikasi tersebut maka dapat terdapat dua katagori desa berproduktifitas tinggi dan rendah yang dapat disajikan sebagai berikut :

relatif rendah karena banyaknya unsur gamping di dalamnya. Disamping itu faktor penggunaan benih bermutu juga sangat berpengaruh pada tingkat produktifitas.

Kecukupan pangan dihitung dari jumlah penduduk pada tahun tertentu dikalikan dengan kebutuhan konsumsi penduduk setiap tahunnya selanjutnya dibandingkan dengan produksi beras yang dihitung dari 60% produksi gabah kering punggut yang dihasilkan. Adapun

No	Kalsifikasi lahan	Nama Desa
1	Klasifikasi tinggi (didas 6.3 ton gabah kering punggut)	Banguntapan, Tamanan, Singosaren, Jambidan, Wirokerten, Baturetno, Potorono, Bangunharjo,
2	Klasifikasi rendah (dibawah 6,3 ton gabah kering punggut)	Pendowoharjo, Timbulharjo, Panggungharjo Ngestiharjo, Bangunjiwo, Tamantirto, Tirtonirmolo, Jagalan

Sumber: Analisis data

Berdasarkan klasifikasi tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pada daerah yang berproduktifitas rendah banyak disebabkan oleh kondisi kesuburan tanah dan besarnya air yang dapat mengairi wilayah tersebut terutama di Desa Bangunjiwo mempunyai produktifitas rendah banyak disebabkan oleh jaringan pengairan yang relatif masih rendah dan kesuburan tanahnyaapun

asumsi yang digunakan adalah kebutuhan pangan beras maksimal adalah 98 kg per kapita per tahun sesuai dengan hasil sensus ekonomi tahun 1999 di propinsi DIY. Guna menghitung aspek kecukupan pangan maka data yang diperlukan adalah besarnya jumlah penduduk di periurban dan data kemampuan lahan untuk memproduksi dalam satu tahun.

No	Klasifikasi kemampuan lahan menyediakan pangan	Nama Desa
1	Lahan mampu menyediakan pangan	Tamanan, Jambidan, Wirokerten, potorono, Baturetno, Panggungharjo, Bangunharjo, Timbulharjo, Pendowoharjo, Panggungharjo, Tamantirto, Tirtonirmolo
2	Lahan tidak mampu menyediakan kebutuhan pangan	Banguntapan, Jagalan, Singosaren, Ngestiharjo, Bangunjiwo,

Sumber: Analisis data

Klasifikasi kemampuan lahan ini dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan pengembangan suatu kawasan. Pada lokasi yang mempunyai kemampuan menyediakan pangan tinggi maka kawasan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai kawasan pertanian. Adapun kawasan yang memiliki kecenderungan rendah kemampuan penyediaan pangannya dapat diarahkan pada pengembangan kawasan non pertanian.

Terciptanya sebuah ketahanan pangan di suatu kawasan tidak lepas dari fungsi ketahanan pangan itu sendiri diantaranya adalah distribusi pangan. Proses distribusi pangan khususnya beras dapat dibedakan menjadi distribusi benih dan distribusi beras konsumsi. Pada distribusi benih padi sudah terdapat BPB Barongan yang berfungsi sebagai pusat perbenihan di Kabupaten Bantul. Di samping itu ada pula beberap perusahaan benih. Pendistribusian benih biasanya lewat toko benih, produsen pupuk, dan kelompok tani.

Pada beras konsumsi mempunyai sistem distribusi meliputi penjualan dalam daerah maupun luar daerah seperti Kulontprogo, Demak dan Purworejo, akan tetapi yang paling berperan dalam proses distribusi adalah pedagang besar dan pemilik penggilingan.

Prediksi kecukupan pangan di periurban dapat diketahui menggunakan trend linier, dengan memperhitungkan tren total produksi yang diperoleh dari perkalian antara produktifitas dengan luas panen dalam satuan kuintal, selanjutnya dikalikan 60 prosen sehingga menjadi total produksi beras.

Adapun prediksi kebutuhan pangan menggunakan trend jumlah penduduk dikalikan kebutuhan pangan (beras) dalam satu tahun. dengan menggunakan katagori tingkat konsumsi pangan berdasarkan survey ekonomi Prpopinsi DIY tahun 1999 yang dilakukan oleh BPS sebesar 98 kg/kapita per tahun. Adapun hasil perhitungan Prediksi pada tahun 2011 desa-desa yang sudah tidak mampu lagi memenuhi kecukupan pangan adalah desa Banguntapan, Jagalan, Singosaren, Panggungharjo, Ngestiharjo, Tamantorto, Tirtonirmolo dan Bangunjiwo. Demikian pula bila prediksi dilakukan sampai dengan tahun 2016 terdapat tambahan 1 desa yang tidak mampu memenuhi pangan yaitu Batu-retno.

### **C. Prioritas Pengembangan Kawasan**

Indikator yang digunakan untuk menentukan pengembangan kawasan di periurban adalah alih fungsi lahan, produktifitas tanaman, ketersediaan pangan, nilai jual lahan dan pertumbuhan penduduk, potensi pendukung dominan. Pengembangan kawasan di periurban dapat dibedakan pada 2 tema pengembangan pokok yaitu kearah pertanian dan non pertanian, yang selanjutnya dapat dijabarkan lagi 4 arah pengembangan berdasarkan matrik indikator penentuan prioritas pengembangan kawasan sebagai berikut:



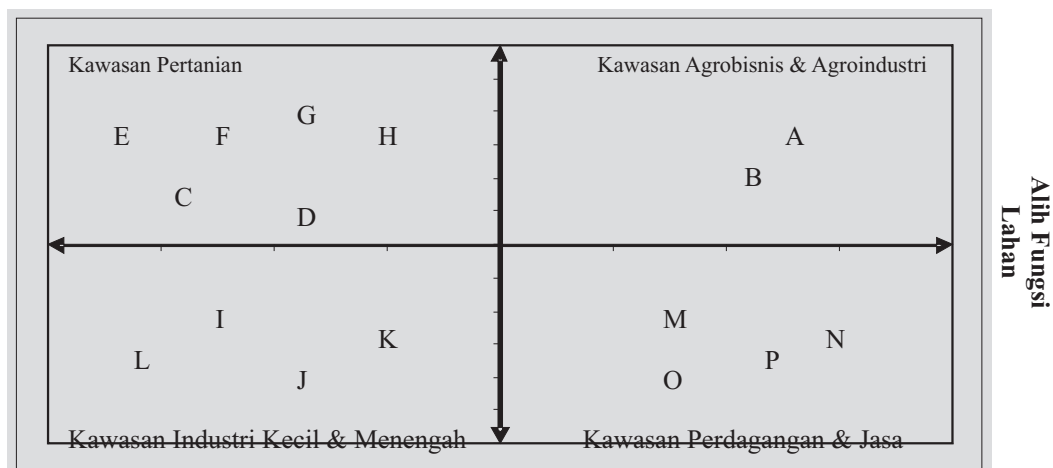
Tabel Indikator Penentuan Prioritas Pengembangan Kawasan

Indikator	Alih fungsi lahan	Produktifitas	Ketersediaan pangan	Nilai jual lahan	Pertambahan penduduk
Kawasan Pertanian	Rendah	Tinggi	Tinggi	Rendah	Rendah
Agrobisnis/Industri	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Perdagangan dan jasa	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Tinggi
Industri kecil dan kerajinan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber: Pengolahan data

Dengan menggunakan 5 indikator tersebut dibuat grafik yang membandingkan tentang kebijakan lahan dan ketahanan pangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Gambar Prioritas Pengembangan Kawasan Periurban



**Keterangan :**

**Kawasan Agrobisnis & Agroindustri**

A : Bangunharjo  
B : Baturetno

**Kawasan Industri Kecil Kerajinan**

I : Bangunjiwo  
J : Jagalan  
K : Tamantirto  
L : Tirtonirmolo

**Kawasan Pertanian**

C : Tamanan  
D : Potorono  
E : Wirokerten  
F : Pendowoharjo  
G : Jambidan  
H : Timbulharjo

**Kawasan Perdagangan & Jasa**

M : Ngestiharjo  
N : Banguntapan.  
O : Singosaren.  
P : Panggungharjo

Setelah diketahui tema-tema pengembangan maka guna mengetahui strategi alternatif pengembangan kawasan periurban dilakukan dengan Analisis SWOT. Pembahasan dilakukan terhadap dua kebijakan utama yaitu kebijakan alih fungsi lahan dan kebijakan ketahanan pangan di periurban. Adapun hasil pembahasannya pada masing-masing kawasan diuraikan di bawah ini.

#### **a. Kawasan Pertanian**

Hasil pemetaan interaksi antara faktor internal dan eksternal dan dengan mempertimbangkan kondisi, kendala, potensi, dan peluang, maka dapat diperoleh strategi alternatif pengembangan kawasan pertanian sebagai berikut:

- a) Penguatan kebijakan ketahanan pangan dengan peningkatan produktifitas dan perbaikan teknologi budidaya.
- b) Pemberian insentif kepada petani guna melestarikan usaha pertanian.
- c) Meningkatkan peran kelembagaan untuk pembelian bersama saprodi.
- d) Mengendalikan fragmentasi lahan dan meningkatkan kesuburan tanah.

#### **b. Kawasan Industri Kecil dan Kerajinan**

Hasil pemetaan interaksi antara faktor internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi, kendala, potensi, dan peluang, maka dapat

diperoleh strategi alternatif pengembangan kawasan industri kerajinan sebagai berikut:

- a) Pengembangan dan penguatan sentra industri kerajinan kawasan.
- b) Pengembangan asosiasi pengembangan disain dan bahan baku.
- c) Pembentukan forum kerjasama pengrajin, Perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
- d) Pemberdayaan pengrajin dengan penyediaan lahan untuk pengrajin lokal.

#### **c. Kawasan Perdagangan dan Jasa**

Hasil pemetaan interaksi antara faktor internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kondisi, kendala, potensi, dan peluang, maka dapat diperoleh strategi alternatif pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagai berikut:

- a) Pemantapan dan pengembangan jalur perdagangan dan distribusi.
- b) Pemantapan penataan tata ruang kawasan.
- c) Pengendalian pertumbuhan penduduk.
- d) Pemantapan peluang investasi dan pelayanan publik.

#### **d. Kawasan Agrobisnis dan Agroindustri**

Hasil pemetaan interaksi antara faktor internal dan eksternal dengan

mempertimbangkan kondisi, kendala, potensi, dan peluang, maka dapat diperoleh strategi alternatif pengembangan kawasan agrobisnis dan agro-industri sebagai berikut:

- a) Pemantapan kebijakan ketahanan pangan dengan prioritas sebagai *seed centre*.
- b) Pemantapan jalur distribusi benih dan kualitas penangkar.
- c) Pengendalian alih fungsi lahan dengan peningkatan harga jual produksi.
- d) Peningkatan koordinasi antar Pemerintah Daerah.

#### IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Kebijakan lahan yang berkaitan tentang alih fungsi lahan belum mampu mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di daerah periurban. Hal ini dapat dilihat dari kondisi alih fungsi lahan yang selalu terjadi sepanjang tahun dengan angka penyusutan lahan rata-rata 0,5% per tahun. Klasifikasi penyusutan lahan kategori tinggi diatas 0,52% meliputi Desa Ngestiharjo, Banguntapan, Bangunharjo dan Baturetno. Adapun penyusutan lahan berkategori rendah di bawah 0,52% adalah Desa Tamantirto, Tirtonirmolo, Wirokerten, Tamanan, Pendowoharjo, Timbulharjo, Potorono, Jambidan, Bangunjiwo, Singosaren, dan Panggungharjo.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan di periurban adalah faktor aksesibilitas kawasan, faktor ekonomi dan faktor demografi
3. Dengan menggunakan tingkat konsumsi 98 kg per kapita per tahun maka desa yang mampu menyediakan kebutuhan pangan adalah desa Tamanan, Wirokerten, Jambidan, Potorono, Baturetno, Singosaren, Panggungharjo, Bangunharjo, Timbulharjo, Pendowoharjo, Tamantirto, dan Tirtonirmolo. Sedangkan yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya adalah Desa Banguntapan, Jagalan, Ngestiharjo, Singosaren, dan Bangunjiwo.
4. Prediksi tingkat kecukupan pangan sampai tahun 2011 desa yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangannya adalah desa Banguntapan, Jagalan, Singosaren, Panggungharjo, Ngestiharjo, Tamantirto, Tirtonirmolo, dan Bangunjiwo. Sedangkan prediksi pada tahun 2016 bertambah satu desa yaitu Baturetno.
5. Berdasarkan analisis terhadap kebijakan alih fungsi lahan dan ketahanan pangan dengan mempertimbangkan trend pertumbuhan penduduk, kecukupan pangan kawasan, dan peraturan daerah maka diperoleh empat prioritas pengembangan kawasan periurban sebagai berikut:

- Kawasan pertanian adalah Potorono, Jambidan, Timbulharjo, Pendowoharjo, Tamanan, , dan Wirokerten. Adapun strategi alternatif pengembangan kawasan yang dapat diimplementasikan adalah penguatan kebijakan ketahanan pangan melalui insentif petani, intensifikasi, perbaikan teknologi dan penguatan kelembagaan.
- Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah Ngestiharjo, Banguntapan, Singosaren, dan Panggungharjo. Adapun strategi alternatif pengembangan kawasan yang dapat diimplementasikan adalah pemantapan dan pengembangan jalur perdagangan dan distribusi melalui penataan ruang kawasan, pemanfaatan peluang investasi, peningkatan sarana pelayanan publik dan pengendalian jumlah penduduk.
- Kawasan Industri kecil adalah Jagalan, Bangunjiwo, Tirtonirmolo, dan Tamantirto. Adapun strategi alternatif pengembangan yang dapat diimplementasikan adalah Pengembangan dan penguatan sentra industri kerajinan melalui penguatan asosiasi untuk pengembangan design dan penyediaan bahan baku serta penyediaan lahan untuk pengrajin lokal.
- Kawasan Agrobisnis dan Agroindustri adalah Bangunharjo dan , Baturetno.

Adapun strategi alternatif pengembangan kawasan yang dapat diimplementasikan adalah pemantapan kebijakan ketahanan pangan dengan prioritas Bantul sebagai seed centre melalui pemantapan jalur distribusi benih, peningkatan kualitas penangkar, pengendalian fragmentasi lahan, koordinasi antar Pemerintah Daerah.

#### **REKOMENDASI KEBIJAKAN**

1. Segera dilakukan pembuatan Rencana Detail Tata Ruang yang baru karena perkembangan dan perubahan di periurban sangat cepat.
2. Program kebijakan lahan dan ketahanan pangan dilakukan sesuai dengan penentuan prioritas pengembangan kawasan.
3. Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sebaiknya tidak hanya pada penegakan peraturan yang ada, akan tetapi diperlukan terobosan program dengan pemberian insentif bagi petani yang bersedia tetap mempertahankan lahan pertaniannya.
4. Perlu dirintis adanya kawasan pertanian abadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2004. Analisis Kesesuaian Lahan di Kabupaten Bantul, Bappeda, Bantul.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2006. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Bappeda, 2007.
- Bintarto, R., 1977. Pengantar Geografi Kota. Yogyakarta: Up Spring
- Bishop dan Toussiant, 1979. Pengantar Analisis Ekonomi Pertanian. Jakarta: Mutiara.
- BPS, 2002. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka. Kantor Statistik Propinsi DIY.
- Colin Clark, 1973. *The Value of Agriculture Land*. Pergamon Press, New York.
- Darwin, Muhadjir, 2005. Kemanusiaan Rakyat, Yogyakarta: Benang merah
- Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bantul, 2007, Kebijakan umum Ketahanan
- Dinas Pertanian Provinsi Yogyakarta, 2002. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Propinsi DIY. Yogyakarta.
- Dinas Pertanian, 1983-2002. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Propinsi DIY.
- Dunn, William, 2003. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Freddy Rangkuti, 2008. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fakih, Mansyur 2003. Runtuhnya Teori pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar
- Irawan, 2002. Masalah dan Tantangan Ketahanan Pangan di Indonesia. Kompas, Oktober 2002.
- Kanwil BPN, 2003. Operasional Penatagunaan Tanah. Propinsi DIY
- Kustiwan, A., 1997. Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa. Majalah Prisma.
- Mangunsukardjo dan Woro, 1996. Ekologi Bentang Lahan. Yogyakarta Program Studi Ilmu Lingkungan Jurusan Antar Bidang Program Pasca Sarjana UGM.
- Motoko Shimagami, 2004. Jadi Desa Unggul dengan Produk Unggul, Kompas, 11 Pebruari 2004.

- Mawarni, Agnes. 1996. Kepemilikan lahan dan Masa Depan Sektor Pertanian. Suara Pembaharuan.
- Meier, G.M. 1989. *Development Performance*, terdapat pada *Leading Issues In Economic Development*, Fifth Edition, New York: Oxford University Press
- Midggle, James (1995). *Social development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London: SAGE Publication Inc.
- Nasir, M., 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Panucio dan Jazairy .(1989). *The State of rural Poverty: An Inquiry Into Its Causes and Consequences* (Page 26-68)
- Pryor, Robin . 2003. *Defiing the Rural Urban Fringe*, <http://www.jstor.org>
- Randal, A., 1987. *Resource Economics*. New York: John Wiley & Son.
- Saragih, B., 2003. Departemen Pertanian Menahan Laju Konversi Lahan Pertanian. Kompas.
- Sihabudin, 1995. Analisis Konversi Lahan Sawah ke Industri dengan Metode Sewa Ekonomi Lahan. Bogor: Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian IPB.
- Soekarwati.1986. Analisis fungsi. Malang: Cobb Duoglas.Fakultas Pertanian.
- Soemarwoto, O., 1985. Dampak Lingkungan Transisi Masyarakat Agraris ke Masyarakat Mandiri. Musyawarah Nasional ke 5 di Bandung.
- Suharto, Edi, 2006. Analisis Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M.P. 1989. *Growth, Poverty, and Income Distributuion*
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Jakarta: Buku Kita
- Winoto, Joyo. 1996. Seminar Hasil-hasil Penelitian IPB, Suara Pembaharuan 13 Nopember
- Yunus, Hadi .(1999). Struktur Tata Ruang Kota, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.